

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas kehendak-Nya kami dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dengan baik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan semua pihak yang telah bekerja dan berperan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pada hakikatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan indikator kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan. Penyusunan laporan ini memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan perangkat daerah selama tahun 2022 sebagai wujud transparansi tata pemerintahan yang baik.

LKjIP Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 merupakan LKjIP tahun kelima Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022. Penyusunan LKjIP ini merupakan analisis realisasi kinerja, capaian sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang menjadi indikator (tolak ukur) pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dalam satu tahun anggaran yang dapat dipergunakan sebagai penilaian pengambilan keputusan pihak-

pihak terkait dalam melakukan introspeksi guna membuat langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Melalui LKjIP Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2022 ini diharapkan terjadi optimalisasi peran Pemerintah Daerah dan peningkatan efisiensi, dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan ke depannya, sehingga mendukung kinerja pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, dengan adanya laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari, bahwa masih banyak kekurangan pada akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, baik dari aspek kinerja maupun penyajian laporan ini, oleh karena itu kami berharap adanya masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.

Salakan, Februari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IHSAN BASIR, SH., LL.M

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi-misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (**result oriented government**). Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi. Dengan demikian, LKjIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 ini untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun anggaran 2022 sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja sebagaimana visi dan misi organisasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGGAI KEPULAUAN YANG MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2022 memuat tujuan dan sasaran strategis organisasi (Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan), indikator kinerja dan rencana capaian target kinerja tahunan mulai tahun 2017-2022 serta arah kebijakan yang menjadi program utama. Program utama ini lebih lanjut akan dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan tahunan. Guna menjaga konsistensi penggunaan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama 5 (lima) tahun perencanaan, dibakukanlah sasaran dan indikator kinerja dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan dan kinerja tahunan.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2022 dapat dikatakan Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 2022 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 2022. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 14 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 menunjukkan bahwa beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, antara lain:

1. Kurang adanya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RPJMD. Umumnya dalam LKjIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 pelaksanaan program tahunan yang tertuang didalam RKPD, penganggaran program dan kegiatan OPD masih bersifat project oriented, belum berorientasi pada pencapaian sasaran yang telah tertuang didalam RPJMD ataupun sasaran strategis. Sehingga terdapat program-program yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan yang relative besar. Oleh karena itu perlu adanya komitmen atau penegasan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas daerah.
2. Kurang pemahaman SDM aparatur dalam menyikapi perubahan aturan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program pembangunan yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi perangkat daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	3
1.3 Sistematika Penyajian LKjIP	25
BAB. II PERENCANAAN DAN INDIKATOR KINERJA	26
2.1 Perencanaan Kinerja	26
2.2 Indikator Kinerja	33
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	38
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	39
3.3 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Sasaran Pembangunan	43
3.4 Pengelolaan Belanja Daerah	53
3.5 Pengelolaan Pembiayaan Daerah	56
BAB. IV PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel	U r a i a n	Hal.	
2.	1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2022	34
3.	1	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	40
3.	2	Capaian Indikator Tahun 2022	43
3.	3	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Pertama	44
3.	4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kedua	44
3.	5	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Ketiga	45
3.	6	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Keempat	46
3.	7	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kelima	46
3.	8	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Keenam	47
3.	9	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Ketujuh	48
3.	10	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kedelapan	49
3.	11	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kesembilan	50
3.	12	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kesepuluh	50
3.	13	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kesebelas	51
3.	14	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kedua belas	52
3.	15	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Ketiga belas	52
3.	16	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Keempat belas	53
3.	17	Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	54
3.	18	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022	57
3.	19	Target dan realisasi Belanja Daerah	58
3.	20	Ringkasan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***resultoriented governement***). Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi.

SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Penyelenggaran SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja, serta rewiu dan evaluasi kinerja. Sesuai siklusnya, setelah selesai pelaksanaan anggaran dan kegiatan, entitas akuntabilitas satuan kerja, entitas akuntabilitas unit kerja, dan entitas akuntabilitas kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, menyusun laporan kinerja tahunan atau lebih dikenal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semua instansi pemerintah wajib menyusun LKjIP. Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan kembali instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem perencanaan dan pelaporan yang berkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan dan kinerja dengan waktu penyusunan yang berbeda sesuai siklusnya. Oleh karena itu dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, RKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LKjIP 2022.

LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang **Dokumen Perjanjian Kinerja** merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

- Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
- Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Bahan penyusunan rencana program/kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun berikutnya.

Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966). Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan periode Tahun 2017-2022 disahkan dengan Keputusan Minter Dalam Negeri Nomor 131.72–3060 Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ini disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk menifestasi dari evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. LKjIP merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 –2022.

1.2 Gambaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat dari organisasi perangkat daerah beserta tugas dan fungsi dan aspek strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.2.1 Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam menjalankan pemerintahan yang menjadi urusan daerah. Meskipun Perangkat Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, terdiri dari :

1. Sekretariat

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD

2. Dinas

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Dinas Perikanan
- c. Dinas Kesehatan
- d. Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika
- f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- g. Dinas Pariwisata
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- l. Dinas Sosial
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- o. Dinas Ketahanan Pangan
- p. Dinas Lingkungan Hidup
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga

- r. Dinas Perhubungan
- s. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- t. Dinas Pertanian
- u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Badan

- a. Badan Pendapatan Daerah
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda)
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- g. Inspektorat
- h. Rumah Sakit Trikora Salakan
- i. Rumah Sakit Pratama

4. Perangkat Daerah lainnya

- a. Kecamatan
- b. Kelurahan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan, tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar OPD dan Tugasnya

No.	Nama OPD	Tugas
1.	Sekretariat Daerah	Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative
2.	Sekretariat DPRD	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidangadministrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4.	Dinas Perikanan	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kelautan dan perikanan
5.	Dinas Kesehatan	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesehatan
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub polisi pamong praja dan kebakaran
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik
8.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas di

		bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
9.	Dinas Pariwisata	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas di bidang Pariwisata
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan
13.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14.	Dinas Sosial	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
17.	Dinas Ketahanan Pangan	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada

		Daerah di bidang Ketahanan Pangan
18.	Dinas Lingkungan Hidup	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Lingkungan Hidup
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga
20.	Dinas Perhubungan	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perhubungan
21.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
22.	Dinas Pertanian	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Pertanian
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24.	Badan Pendapatan Daerah	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan daerah
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan

	Penelitian Pengembangan	Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
30.	Inspektorat	Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
31.	Rumah Sakit Umum Trikora Salakan	membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan
	Rumah Sakit Pratama	membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan

1.2.2 Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan satu dari dua belas kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten ini sebelumnya merupakan kesatuan wilayah Kabupaten Banggai yang resmi terbentuk menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966).

Secara astronomis, Kabupaten Banggai Kepulauan terletak antara 1° 06' 30" Lintang Selatan sampai dengan 1° 35' 58" Lintang Selatan dan 122° 37' 6,3" Bujur Timur sampai dengan 123° 40' 1,9" Bujur Timur di Pulau Sulawesi. Batas wilayah administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku, dan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling.

□



Gambar Peta Wilayah

Kabupaten Banggai Kepulauan Secara Administrasi memiliki 12 kecamatan yang terbagi menjadi 141 desa, dan 3 kelurahan. Berikut ini Tabel yang menunjukkan jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 1
Jumlah Desa dan Kelurahan berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Desa	Kelurahan
01. Totikum	11	
02. Totikum Selatan	8	
03. Tinangkung	10	1
04. Tinangkung Selatan	9	
05. Tinangkung Utara	6	

06. Liang	16	
07. Peling Tengah	11	
08. Bulagi	15	1
09. Bulagi Selatan	20	
10. Bulagi Utara	11	1
11. Buko	13	
12. Buko Selatan	11	
Banggai Kepulauan	141	3

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Bulagi Selatan memiliki jumlah desa terbanyak yakni 20 desa, disusul Kecamatan Liang dengan 16 desa dan Kecamatan Bulagi dengan 15 desa dan 1 kelurahan. Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas daratan dengan luas 2.488,79² dan lautan dengan luas 6.671,32².

Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dibagi menjadi 4 satuan utama, yaitu: pegunungan/perbukitan struktural, pegunungan/perbukitan karst, perbukitan intrusif, dan dataran rendah.

Pegunungan struktural terdapat di bagian barat Pulau Peling, memanjang dengan pola selatan - utara dengan ketinggian lebih dari 700 Mdpl, lereng curam hingga sangat curam dengan kemiringan ≥ 40 persen. Morfologi ini terdapat di sekitar perbatasan Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi Selatan, dan Kecamatan Bulagi. Perbukitan struktural terdapat hampir di seluruh pulau, dengan ketinggian mulai ± 200 hingga ± 700 meter di atas muka air laut, dengan lereng relatif miring (15-30 persen) hingga berbukit curam (30-40 persen), yang terdapat di Pulau Peling. Puncak-puncak bukit terdapat di Bukit Basal di Pulau Peling bagian timur.

(a) Perbukitan dan pegunungan karst menempati sebagian besar Pulau Peling, dan secara lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola kerucut dan lembah karst, dolin, gua, ponor, dan sungai bawah

tanah. Puncaknya terdapat di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit Blombong di Pulau Peling.

- (b) Dataran rendah terbentang di sepanjang wilayah pesisir dan lembah-lembah antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagian besar dijumpai di bagian utara Pulau Peling, dan sebagian kecil di selatan Pulau Peling.

1.2.3 Aspek Strategis Kabupaten Banggai Kepulauan

Aspek strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tersebut dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan 2017–2022 sebagai berikut :

Aspek Pariwisata dan Perikanan

Aspek Pariwisata

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah merupakan daerah yang sebagian wilayahnya adalah dataran laut sehingga merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah di bidang pariwisata. Misalnya di bidang Pariwisata yang perlu dikembangkan adalah pelayanan industry pariwisata yang dinilai masih sangat rendah dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada d daerah mereka berikutnya perlunya mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata itu sendiri karena dari pemerintah daerah masih sangat lemah. Konsep pembangunan wisata berwawasan ekologi dan inovatif di lingkungan pariwisata, desain kampanye wisata masih belum optimal, dan paling utamanya adalah peran aktif masyarakat local dalam pengembangan wisata yang masih kurang dan yang tidak kalah pentingnya adalah informasi pariwisata yang belum dikenal secara terbuka bai melalui website resmi milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan maupun publikasi regular seperti peta wisata, buku perjalanan wisata, publikasi singkat informasi pariwisata yang dapat di akses secara gratis.

Aspek Perikanan

Sumber daya kelautan dan perikanan saat ini hanya dimanfaatkan sebatas usaha penangkapan bagi kebutuhan rumah tangga nelayan, budidaya belum teroptimalkan. Limbah perikanan belum dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan beberapa mekanisme pengolahannya. Beberapa lokasi kawasan budidaya serta zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kualitas produk perikanan yang dihasilkan baik oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan masih di bawah standar mutu yang dipersyaratkan. Sentuhan teknologi pada pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan masih sederhana. Aktivitas illegal fishing yang mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove dan berdampak pada prosuksi hasil tangkapan nelayan masih ditemukan di wilayah kepulauan terutama di wilayah yang jauh dari jangkauan pengawasan yang berhadapan langsung dengan wilayah Kabupaten Banggai Laut.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Nilai PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Banggai Kepulauan selama 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan,. Kabupaten Banggai Kepulauan masih harus meningkatkan kontribusi semua sektor pendukung, sehingga mampu bersaing dengan daerah yang lain.

Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan produksi dan harga jual beberapa komoditi sub sektor perkebunan terus naik. Kontribusi sektor lain terhadap PDRB cenderung meningkat dari target mulai diawal tahun perencanaan 2017 22,62% naik menjadi 48,80% kemudian di tahun 2018 ditargetkan 22,65% realisasi menjadi 48,80% dan pada tahun 2019 target 22,69% menurun dari realisasi di tahun sebelumnya menjadi 48,71% tetapi masih melebihi dari target yang akan dicapai pada setiap tahunnya berdasarkan indikator kerja utama.

Perkembangan inflasi secara tidak langsung juga dapat menjadi gambaran perkembangan inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah pada

umumnya termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini menunjukkan *trend* peningkatan inflasi tahunan dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014. Namun inflasi kemudian melambat di Tahun 2015 dan Tahun 2016, yang menunjukkan adanya kestabilan harga.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung menurun setiap tahunnya. Namun angka penurunannya tidak terlalu jauh. Pada Tahun 2020 IPM Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami penurunan dari target 66,1% menjadi 65,42%. Hal ini merupakan indikasi bahwa kualitas manusia di Banggai Kepulauan yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan daya ekonomi mengalami penurunan.

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan yang secara eksplisit bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di tingkat nasional.

Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan pergerakan positif yakni dari Tahun 2012, persentase jumlah penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 82,97 persen meningkat menjadi sebesar 83,82 pada Tahun 2016. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa taraf hidup sebanyak 83,86 persen penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan telah berada di atas garis kemiskinan. Meski demikian, angka ini masih berada di bawah angka Provinsi. Oleh karena itu, perlu perhatian serius dan intervensi pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan.

Penghapusan kemiskinan merupakan tujuan pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi arah pembangunan bagi negara-negara di dunia guna tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Adapun

upaya menekan bahkan menghapus angka kemiskinan perlu menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan perangkat daerah harus dapat bersinergi dan mampu menyentuh masyarakat miskin di berbagai pelosok kabupaten dan di semua sektor lapangan usaha secara menyeluruh.

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan pemuda dan olahraga. Bidang kebudayaan merupakan pengembangan dan sekaligus pemeliharaan atas warisan leluhur secara turun-temurun terhadap barang dan perilaku masyarakat. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki seni dan budaya beragam. Ada beberapa jenis seni dan budaya yaitu seni tari, suara, dan drama/teater. menunjukkan jumlah grup kesenian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2011 grup kesenian berjumlah 12 grup dan terus meningkat sampai dengan saat ini. Pada Tahun 2016 grup kesenian berjumlah 14 grup dan terdapat 5 Gedung kesenian yang tersebar di wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga.

Aspek Pelayanan Umum

Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio ketersediaan gedung sekolah/penduduk usia sekolah, Rasio guru/murid.

Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. RSUD saat ini di Banggai Kepulauan telah memiliki 2 Rumah Sakit yang beroperasi setelah Rumah Sakit Pratama Lumbi-lumbia resmi beroperasi pada September 2018 Pelayanan di RSUD Banggai Kepulauan saat ini telah berjalan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan pembangunan bidang pekerjaan umum dengan indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Panjang jalan, Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk, Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk, Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat. Dan indikator pembangunan urusan penataan ruang adalah Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB, dan Bangunan ber-IMB.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten. Kabupaten Berdasarkan data yang dihimpun dari Perangkat Daerah dan BPS, diperoleh bahwa kurun waktu 2012-2016 rasio jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan dengan rasio yang cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 rasio mencapai 0,11 yang bermakna setiap 11 rumah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat 1 rumah yang tidak layak huni.

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pemahaman Kewaspadaan Nasional, Pemahaman Wawasan Politik, Bela Negara, Pemerintahan Umum, Pengawasan Orang Asing, Konflik Sosial, Deteksi Dini, Ketahanan Seni Budaya, Agama, Pangan dan Kerukunan Umat Beragama.

Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, Karang Taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial.

Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

Pelaksanaan urusan tenaga kerja diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Perkembangan penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari indikator rasio KDRT dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola

konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi danimbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Pertanahan

Perkembangan data pertanahan dapat dilihat pada indikator Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan dan Meningkatnya permasalahan pertanahan yang diselesaikan.

Lingkungan Hidup

Secara umum target SPM Bidang Lingkungan Hidup telah tercapai semua pada Tahun 2014. Tahun 2015 merupakan tahun peralihan apakah SPM masih berlanjut atau tidak (karena Bidang Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang tidak terkait lagi dengan Pelayanan Dasar) serta semua aduan yang masuk telah ditindaklanjuti.

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio kepemilikan dokumen kependudukan terus meningkat.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat yang merupakan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka partisipasi terhadap program yang diselenggarakan oleh berbagai Perangkat Daerah dilakukan melalui strategi pendampingan secara konseptual.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran pelaksanaan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan indikator rata-rata jumlah jiwa per keluarga dan cakupan peserta KB aktif.

Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.

Komunikasi dan Informatika

Pengkajian dan penelitian bidang informasi, penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bisa memberikan informasi kebijakan dan pembangunan kepada masyarakat.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan perkoperasian Kabupaten Banggai Kepulauan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 secara umum meningkat baik dari kondisi koperasi aktif, jumlah koperasi jumlah anggotanya maupun volume usahanya. Sehingga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan lagi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Penanaman Modal

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. Nilai investasi Kabupaten Banggai Kepulauan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 secara umum mengalami peningkatan, meskipun penambahan jumlah investor setiap tahunnya bersifat fluktuatif. Hal-hal yang mempengaruhi investasi adalah pertumbuhan penduduk, inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung.

Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan.

Kebudayaan

Beberapa indikator pengelolaan potensi budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali), Sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Perpustakaan

Berkaitan dengan penambahan koleksi bahan pustaka, target sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar 1953 eksemplar, realisasi/capaian sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 1953 atau sebesar 100%. Adapun koleksi bahan pustaka tersebut meliputi: koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 20156 eksemplar, fiksi sebanyak 430 eksemplar, non fiksi sebanyak 1456 eksemplar, majalah tidak tersedia.

Kearsipan

Indikator pembangunan urusan kearsipan adalah Cakupan pengelolaan arsip secara baku, dan Persentase Perangkat Daerah menerapkan arsip secara baik.

Urusan Pilihan

Perikanan

indikator pembangunan urusan perikanan adalah jumlah Produksi perikanan, Konsumsi ikan, Cakupan bina kelompok nelayan, dan Produksi perikanan kelompok nelayan.

Pariwisata

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pertanian

Indikator kinerja pembangunan pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan Cakupan bina kelompok petani.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan mengalami kenaikan

sejak Tahun 2017-2019. Tahun 2017 sektor pertanian/perkebunan memberikan kontribusi sebesar 154,13% persen terhadap PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Tahun 2018 kontribusi pertanian/perkebunan naik menjadi 215,45% persen. Tanaman hortikultura semusim, dan tanaman perkebunan memegang peranan penting terhadap pembentukan nilai sektor pertanian/perkebunan.

Perindustrian

Pertumbuhan industri kecil dan rumah tangga relatif kecil.

Transmigrasi

Penempatan transmigrasi selama beberapa tahun ini mengalami penurunan.

Fungsi Penunjang

Perencanaan

Keberhasilan dapat dilihat dengan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Keuangan

Administrasi Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan mendapat WDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021. Opini WDP yang diberikan BPK memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan daerah di Banggai Kepulauan Nilai tersebut merupakan pembenahan dan perbaikan untuk menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan dan lebih meningkatkan kinerja Pemerintah untuk Tahun berikutnya mendapat status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Prioritas pemanfaatan aset daerah difokuskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi penataan, pengelolaan dan pemberdayaan aset daerah dilakukan secara periodik antara lain melalui sertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah,

inventarisasi dan identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset serta penyelesaian kasus/sengketa.

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan sumber daya aparatur merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kinerja aparatur. Pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan, melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efisiensi kinerja, serta produktifitas kinerja pegawai agar pegawai dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan nasional dan tantangan global. Dalam upaya meningkatkan efisiensi kinerja, serta produktivitas kinerja aparatur melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan serta pembinaan-pembinaan terhadap pegawai. Peningkatan kapasitas SDM aparatur antara lain dilaksanakan melalui pengiriman PNS untuk tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar, pelaksanaan diklat, bimbingan teknis, dan pengembangan karier PNS melalui promosi terbuka dan *assessment center* pegawai.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang dijabarkan melalui beberapa tahapan *road map*. Dalam rangka perwujudan *goodgovernance* telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 oleh pemerintah pusat yang harus diacu oleh pemerintah daerah. Reformasi Birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif).

Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Perlunya pengembangan Sistem Inovasi

Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

Fungsi Lainnya

Kesekretariatan DPRD

Untuk mendukung peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat, maka Kesekretariatan DPRD sangat berperan dalam terlaksananya layanan fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi Administratif dan Pelayanan

Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat serta mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat perlu adanya kebijakan.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan dapat menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi maupun kapasitas fiskal.

Pembinaan dan Pengawasan

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pemeriksaan reguler sebanyak 24 Obrik, pemeriksaan kasus/khusus dari target 32 LHP dapat tercapai sebanyak 32 (tiga puluh dua) LHP, peninjauan laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat tercapai 1 (satu) LHP, Laporan Review LAKIP 1 (satu) LHR, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKPN) dari target 172 (seratus tujuh puluh dua) laporan dapat tercapai 105 (seratus lima) laporan dan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) tercapai 1 (satu) kegiatan.

Administrasi Umum pada Semua Perangkat Daerah

Untuk mendukung terlaksananya semua kegiatan dalam pembangunan daerah, maka administrasi umum sangat diperlukan demi kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Administrasi umum pada semua Perangkat Daerah meliputi kegiatan rutin yang ada di setiap Perangkat Daerah.

Aspek Daya Saing Daerah

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Banggai Kepulauan tingkat pendapatan masyarakat tercermin dari PDRB per kapita.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan, fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya :

Perhubungan

Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui pelabuhan dan terminal dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Keadaan ini dikarenakan adanya pelayanan yang lebih baik.

Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian yang mendukung pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun ke tahun selalu meningkat, diantaranya dengan semakin bertambahnya para pelaku usaha pariwisata yaitu Café, rumah makan dan hotel.

Fokus Iklim Berinvestasi

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah.

1.3 Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Gambaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

1.3. Sistematika Penyajian LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.2. Indikator Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

3.2. Capaian Indikator Kerja Utama Tahun 2022

3.3. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Sasaran Pembangunan

3.4. Pengelolaan Belanja Daerah

3.5. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Ukuran Keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 sebagai dokumen perencanaan manajerial komprehensif berfungsi sebagai dokumen perencanaan induk jangka menengah yang memuat visi, misi, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun. Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah untuk menciptakan sebuah tata *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kepemimpinan daerah yang transparan dan akuntabel agar berbagai kebijakan yang diimplementasikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

RPJMD selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan dalam perjalanan waktu lima tahun kedepan, juga berfungsi sebagai dasar penilaian atas kinerja

Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi alat kendali dan tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Selain dari pada itu, RPJMD digunakan juga sebagai landasan formal strategis dan operasional bagi penyusunan perencanaan pembangunan pemerintah daerah setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

A. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG
MAJU, MANDIRI BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA“

Visi diatas mengandung pengertian dan kata kunci antara lain :

1. **Maju**, adalah Gambaran dari tatanan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, mampu memanfaatkan peluang serta dapat menjawab tantangan yang ada dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan.
2. **Mandiri**, Dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat yang mempunyai kapasitas untuk menggerakkan dan mengelola secara swadaya segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
3. **Bermartabat**, Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri sehingga berada pada tatanan kehidupan masyarakat yang mulia.
4. **Berkeadilan**, adalah suatu tatanan mendistribusikan kegiatan dan hasil pembangunan secara merata, menghilangkan kesenjangan antar wilayah di

Kabupaten Banggai Kepulauan serta menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang ada dalam masyarakat.

5. **Sejahtera**, Gambaran masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi: Sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kurun waktu 5 (lima), kedepan mengandung maksud makna dengan penjabaran maka Misi Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.
3. Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya lestari.
4. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.
5. Mengembangkan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai.
6. Penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, tunjangan hari tua dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat

penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif	1. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih, Berwibawa dan Inovatif	1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance & clean Government) 2. Tersediannya Dokumen Perencanaan Peertimbangan Daerah 3. Terwujudnya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. 4. Terwujudnya peningkatan SDM pengelolah Kearsipan. 5. Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat. 6. Terwujudnya pengembangan potensi dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah, sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja 7. Terwujudnya pelayanan public yang prima 8. Terwujudnya pemanfaatan hasil kelitbangan 9. Terwujudnya kebijakan penerapan Inovasi Daerah 10. Terwujudnya pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan PERDA, dan fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun RKPD 11. Terwujudnya layanan Telekomunikasi
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan,	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Terwujudnya peningkatan sarana pendidikan yang berkualitas

	kesehatan dan perekonomian masyarakat.		
		2. Mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan terjangkau	2. Terwujudnya peningkatan mutu tenaga pendidik dan anak didik 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
		3. Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		4. Mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau	1. Meningkatkan kualitas kesehatan yang merata dan berkualitas.
		5. Mewujudkan upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Terwujudnya upaya pengendalian pertumbuhan penduduk 2. Terwujudnya Penurunan Angka Pertililitas 3. Terwujudnya program Bina Keluarga
		6. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat dalam perekonomian	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau 2. Tersedianya tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah
		7. Mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	1. Terwujudnya pemberdayaan perempuan 2. Terwujudnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Terwujudnya pelayanan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
		8. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur perhubungan	1. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur perhubungan pendukung perekonomian masyarakat

		pendukung perekonomian masyarakat	
		9. Tersedianya sarana pengembangan usaha	1. Terwujudnya penyediaan sarana pengembangan usaha
		10. Menyediakan permodalan dalam pengembangan usaha	1. Tersedianya permodalan untuk pengembangan usaha
		11. Mewujudkan ketersediaan lembaga pembiayaan mikro	1. Terwujudnya lembaga pembiayaan mikro
		12. Mewujudkan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan	1. Peningkatan jumlah wirausaha muda 2. Terwujudnya pelaksanaan pembinaan olah raga
		13. Mewujudkan jumlah ketersediaan koleksi Buku Perpustakaan	1. Terwujudnya ketersediaan koleksi Buku
3.	Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya lestari.	1. Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama	1. Terwujudnya lembaga dialog lintas agama
		2. Mewujudkan kondisi ketentraman dan ketertiban Umum	1. Terwujudnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum 2. Terwujudnya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) 3. Terwujudnya Persentase Penegakan PERDA
		3. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat	1. Terwujudnya peningkatan pembinaan keagamaan 2. Terwujudnya pembinaan lembaga adat untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat.
4.	Mengembangkan potensi Wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat	1. Mewujudkan pengembangan objek wisata	1. Terwujudnya pembangunan dan peningkatan prasarana objek wisata

		2. Mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif	1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan daerah 2. Terwujudnya fasilitasi dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
		3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur peningkatan pariwisata dan ekonomi	1. Terwujudnya penyediaan infrastruktur peningkatan pariwisata dan ekonomi
5.	Mengembangkan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai	1. Mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan sarana/teknologi untuk meningkatkan pertanian	1. Terwujudnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian
		2. Mewujudkan ketersediaan pangan utama	1. Terwujudnya ketersediaan pangan utama
		3. Mewujudkan pengembangan sarana nelayan	1. Terwujudnya pembangunan irigasi yang berkualitas 2. Terwujudnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi perikanan
		4. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dari Desa	1. Terwujudnya ketersediaan sarana prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang memadai 2. Terwujudnya peningkatan peran PKK secara Aktif 3. Terwujudnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
6.	Penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, tunjangan hari tua dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan	1. Mewujudkan penyediaan Rumah layak Huni	1. Terwujudnya penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin 2. Terwujudnya penataan kawasan permukiman dan lingkungan
		Mewujudkan	1. Terwujudnya

		penyelesaian Kasus-Kasus Pertanahan	penyelesaian Kasus-Kasus Pertanahan
		Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya RPPLH Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Terjaganya Kualitas Air 3. Terjaganya Kualitas Udara 4. Terwujudnya Pengelolaan Sampah
		2. Mewujudkan pemberian tunjangan hari tua warga miskin dan santunan kematian bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pemberian tunjangan hari tua bagi warga miskin 2. Terwujudnya pemberian santunan kematian bagi masyarakat 3. Terwujudnya pemberian bantuan sosial bagi PMKS 4. Terwujudnya penanganan PMKS Terwujudnya pemberian bantuan bagi korban Bencana Alam Terwujudnya pemberian bantuan bagi korban bencana alam Terwujudnya pemberian bantuan bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial
		Mewujudkan kualitas Tenaga kerja terampil dan mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya jumlah besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana instansi pemerintah telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Pemerintah Daerah Tahun 2022 sesuai Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2022. Penetapan Indikator

Kinerja Tahun 2022 ini bertujuan untuk memperoleh kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik sehingga memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan sebagai perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama 2022 disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan pada tahun 2022 yang sesuai dengan RPJMD 2017 – 2022.

Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar;
2. Peningkatan dan pengelolaan hasil produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
3. Peningkatan produksi dan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan pangan lokal; dan
4. Optimalisasi pengelolaan destinasi dan pemasaran pariwisata.

Penetapan Indikator Pemerintah Daerah Tahun 2022 mengacu pada IKU Tahun 2017 – 2022, RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 – 2022, Renstra OPD dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance & clean Government)	1. Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK 2. Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan APIP 3. Opini BPK	% %	75 70 WDP
2.	Terwujudnya peningkatan profesionalisme	1. ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	%	88,9

	aparatur pemerintah daerah dalam melayani masyarakat			
3.	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat	1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Persentase Penerbitan Akte Kelahiran	% %	100 100
4.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. IPM	%	90,5
5.	Terwujudnya peningkatan mutu tenaga pendidik dan anak didik	1. Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. Persentase Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs	% % %	92 100 100
6.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	1. Angka partisipasi Murni (APM) - APM SD/MI/Paket A - APM SMP/MTs/Paket B 2. Angka partisipasi Kasar (APK) - APM SD/MI/Paket A - APM SMP/MTs/Paket B	% % % %	99 92.50 105 93
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka Usia Harapan Hidup 2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi 3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 4. Prevalensi balita gizi kurang	Usia Hari KH %	66,31 991,86 314/100.000 7,50
8.	Terwujudnya	1. Cakupan Kegiatan Pelaksanaan	Kegiatan	10

	kerukunan kehidupan beragama	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama		
9.	Terwujudnya pembangunan dan peningkatan prasarana obyek wisata	1. Kunjungan Wisatawan -Mancanegara -Domestik	Orang Orang	100 150.000
10.	Terwujudnya penyediaan sarana produksi pertanian	1. Kontribusi Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	22,75
11.	Terwujudnya penyediaan sarana produksi perikanan	1. Produksi Perikanan	Ton	24.207
12.	Terwujudnya penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin	1. Persentase Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	17,30
13.	Terwujudnya penataan kawasan pemukiman dan lingkungan	1. Persentase Pemukiman yang tertata	%	40,20
		2. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0,15
14.	Terwujudnya pemberian tunjangan hari tua bagi warga miskin	1. Penerima Tunjangan Hari tua bagi warga miskin	Orang	9.350

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat akuntabilitas kinerja menunjukkan derajat keterukuran kinerja pemerintah sekaligus dapat pula menunjukkan tingkat kinerja pemerintah. Bagian awal dari akuntabilitas kinerja adalah pengukuran kinerja yang merupakan dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi organisasi.

Perbaikan tata kelola pemerintah merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbentuk kegiatan Penyusunan LKjIP. Penyusunan LKjIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2022. Dalam proses penyusunan LKjIP dilakukan pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerjainstansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Dalam pengukuran kinerja digunakan sistem pengukuran sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 85 s/d 100 :Sangat Berhasil**
- 70 s/d <85 :Berhasil**
- 55 s/d < 70 :Cukup Berhasil**
- 0 s/d< 55 :Kurang Berhasil**

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

◆ Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

◆ Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2 Capaian Indikator Kerja Utama Tahun 2022

Secara umum Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah sesuai RPJMD Tahun 2017-2022.

Adapun rincian Realisasi capaian Kinerja masing-masing IKU berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance & clean Government)	1. Persentase Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK	%	75	70	70
		2. Presentase Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP	%	70	60	60
		3. Opini BPK	WDP			
Rata-rata Capaian Sasaran Pertama						110

2.	Terwujudnya pengembangan potensi dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah, sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja	1. Persentase ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	%	88,9	15,76	17,72
Rata-rata Capaian Sasaran Kedua						17,72
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Persentase Penerbitan Akte Kelahiran	% %	100 100	97,97 77,32	98 77,32
Rata-rata Capaian Sasaran Ketiga						87,66
4.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	90,5	90,5	100
Rata-rata Capaian Sasaran Keempat						100
5.	Terwujudnya peningkatan mutu tenaga pendidik dan anak didik	1. Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 2. Persentase Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs	% % %	92 100 100	92 100 100	100 100 100
Rata-rata Capaian Sasaran Kelima						100
6.	Meningkatkan partisipasi masyarakat	1. Persentase Angka partisipasi Murni (APM) - APM SD/MI/Paket A	% %	99	87,96	88,84

	dalam penyelenggaraan pendidikan	- APM SMP/MTs/Paket B	%	92,50	68,86	74,32
		2. Persentase Angka partisipasi Kasar (APK)	%	105	110,21	104
		- APK SD/MI/Paket A	%	93	79,77	85,35
		- APK SMP/MTs/Paket B				
Rata-rata Capaian Sasaran Keenam						88,75
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka usia harapan hidup	Usia	66,31	66,31	100
		2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Orang	991,86	988	99
		3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	KH	314/100.000	385/100.000	122
		4. Persentase Prevalensi balita gizi kurang	%	7,50	7,8	104
Rata-rata Capaian Sasaran Ketujuh						106
8.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama	1. Cakupan kegiatan pelaksanaan peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Kegiatan	10	1	10
Rata-rata Capaian Sasaran Kedelapan						10
9.	Terwujudnya pembangunan dan peningkatan prasarana obyek wisata	1. Kunjungan Wisatawan - Mancanegara - Domestik	Orang Orang	100 150.000	31 115.155	31 76,77
Rata-rata Capaian Sasaran Kesembilan						53,88
10.	Terwujudnya penyediaan sarana produksi pertanian	1. Persentase Kontribusi Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	22,75	47,94	210,72
Rata-rata Capaian Sasaran Kesepuluh						210,72
11.	Terwujudnya penyediaan sarana produksi perikanan	1. Produksi Perikanan	Ton	24.207	39.703	164
Rata-rata Capaian Sasaran Kesebelas						164
12.	Terwujudnya penyediaan	1. Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah	%	17,30	12,4	71,68

	rumah layak huni bagi warga miskin	Layak Huni				
Rata-rata Capaian Sasaran Kedua belas						71,68
13.	Terwujudnya Penataan kawasan pemukiman dan lingkungan	1. Persentase pemukiman yang tertata 2. Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Ha Ha	3236 93	3329 3329	97,21 2,79
Rata-rata Capaian Sasaran Ketiga belas						50
14.	Terwujudnya pemberian tunjangan hari tua bagi warga miskin	1. Penerima Tunjangan Hari Tua bagi warga miskin	Orang	9.350	4.320	50,3
Rata-rata Capaian Sasaran Keempat belas						50,3

Menurut tabel 3.1 di atas, terdiri dari 14 Sasaran dan 23 IKU, berdasarkan pengukuran penilaian yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya sehingga diperoleh:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Tahun 2022

No.	Kriteria Penilaian	Sasaran
1	Sangat Berhasil	14
2	Berhasil	3
3	Cukup Berhasil	3
4	Kurang Berhasil	3
5	Opini BPK WDP	1
Total		24

3.3 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Sasaran Pembangunan

Adapun rincian Realisasi capaian Kinerja masing-masing IKU yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022, Untuk setiap Sasaran Pembangunan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance & Clean Government) dengan indikator :
 - a. Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan BPK tercapai 70% termasuk kategori **Cukup Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 75% dengan realisasi 70%.
 - b. Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan APIP tercapai 60% termasuk kategori **Cukup Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 70% dengan realisasi 60%.
 - c. Opini BPK Tahun 2022 adalah Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Capaian sasaran ini adalah 65% termasuk kategori **Cukup Berhasil**. Secara rinci perbandingan target dan realisasi yang mendukung pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Pertama

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif	1. Persentase Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK 2. Presentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan APIP 3. Opini BPK	% % WDP	75 70 WDP	70 60 -	70 60 -
Rata-rata Capaian Sasaran Pertama						65

2. Sasaran Terwujudnya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, dengan indikator :
 - a. ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tercapai 17,72% termasuk kategori **Kurang Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 88,9% dengan realisasi 15,76%.

Capaian sasaran ini adalah 17,72% termasuk kategori **Kurang Berhasil**. Secara rinci perbandingan target dan realisasi yang mendukung pencapaian Sasaran Kedua adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kedua

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Terwujudnya pengembangan potensi dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah, sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja	1. ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	%	88,9	15,76	17,72
Rata-rata Capaian Sasaran Kedua						17,72

3. Sasaran Terwujudnya pelayanan publik yang prima, dengan indikator :
 - a. Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercapai 98% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 100% dengan realisasi 97,97%.
 - b. Persentase penerbitan akte kelahiran tercapai 77,32% termasuk kategori **Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 100% dengan realisasi 77,32%.

Capaian sasaran ini adalah 87,66% termasuk kategori **Berhasil**. Secara rinci perbandingan target dan realisasi yang mendukung pencapaian Sasaran Ketiga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Ketiga

No.	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100	97,97	98
		2. Persentase Penerbitan Akte Kelahiran	%	100	77,32	77,32
Rata-rata Capaian Sasaran Ketiga						87,66

4. Sasaran Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikator:
- Indeks Pembangunan Manusia tercapai 100% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 90,5% dengan realisasi 90,5%.

Capaian sasaran ini adalah 100% termasuk kategori **Sangat Berhasil**. Secara rinci perbandingan target dan realisasi yang mendukung pencapaian Sasaran Keempat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Keempat

No.	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
4.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	%	90,5	90,5	100
Rata-rata Capaian Sasaran Keempat						100

5. Sasaran Terwujudnya peningkatan mutu tenaga pendidik dan anak didik dengan indikator :
- Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tercapai 100% kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 92% dengan realisasi 92%.
 - Persentase angka kelulusan tercapai :
 - SD/MI 100% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 100% dengan realisasi 100%.
 - SMP/MTs 100% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 100% dengan realisasi 100%.
- Capaian sasaran ini adalah 100% termasuk kategori **Sangat Berhasil**. Secara rinci perbandingan target dan realisasi yang mendukung pencapaian Sasaran Kelima adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kelima

No.	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
5.	Terwujudnya peningkatan mutu tenaga pendidik dan anak didik	3. Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 4. Persentase Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs	% % %	92 100 100	92 100 100	100 100 100
Rata-rata Capaian Sasaran Kelima						100

6. Sasaran Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan indikator :
- Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) tercapai :
 - SD/MI/Paket A 88,84% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 99% dengan realisasi 87,86%.

- SMP/MTs/Paket B 74,32% termasuk kategori **Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 92,50% dengan realisasi 68,86%.
- b. Persentase angka partisipasi kasar (APK) tercapai :
- SD/MI/Paket A 104% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 105% dengan realisasi 110,21%.
 - SMP/MTs/Paket B 85,35% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 93% dengan realisasi 79,77%.

Capaian sasaran ini adalah 88,75% termasuk kategori **Sangat Berhasil**. Secara rinci perbandingan target dan realisasi yang mendukung pencapaian Sasaran Keenam adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Keenam

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
6.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	3.Persentase Angka partisipasi Murni (APM)				
		- APM SD/MI/Paket A	%	99	87,96	88,84
		- APM SMP/MTs/Paket B	%	92,50	68,86	74,32
		4.Persentase Angka partisipasi Kasar (APK)				
		- APK SD/MI/Paket A	%	105	110,21	104
		- APK SMP/MTs/Paket B	%	93	79,77	85,35
Rata-rata Capaian Sasaran Keenam						88,75

7. Sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau dengan indikator :
- a. Angka usia harapan hidup tercapai 100% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 66,31% dengan realisasi 66,31%.

- b. Angka kelangsungan hidup bayi tercapai 99% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 991,86 dengan realisasi 988.
- c. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tercapai 122% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 314/100.000 KH dengan realisasi 385/100.000 KH.
- d. Persentase Prevalensi balita gizi kurang tercapai 104% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 7,50% dengan realisasi 7,8%.

Capaian sasaran ini adalah 106% termasuk kategori **Sangat Berhasil**. Hal ini berarti pelayanan kesehatan dasar yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pelayanan dan kesadaran masyarakat sudah meningkat. Secara rinci perbandingan target dan realisasi yang mendukung pencapaian Sasaran Ketujuh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Ketujuh

N o	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka usia harapan hidup	Usia	66,31	66,31	100
		2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Orang	991,86	988	99
		3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	KH	314/100.000	385/100.000	122
		4. Prevalensi balita gizi kurang	%	7,50	7,8	104
Rata-rata Capaian Sasaran Ketujuh						106

8. Sasaran Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dengan indikator :

- a. Cakupan kegiatan pelaksanaan peningkatan pelayanan kehidupan beragama tercapai 10% termasuk kategori **Kurang Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 10 dengan realisasi 1.

Capaian sasaran ini adalah 10% termasuk kategori **Kurang Berhasil**. Secara rinci perbandingan target dan realisasi yang mendukung pencapaian Sasaran Kedelapan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kedelapan

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
8	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama	Cakupan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	%	10	1	10
Rata-rata Capaian Sasaran Kedelapan						10

9. Sasaran Terwujudnya pembangunan dan peningkatan prasarana obyek wisata dengan indikator :

- a. Kunjungan Wisatawan tercapai :

- Mancanegara 31% termasuk kategori **Kurang Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 100 Orang dengan realisasi 31 Orang.
- Domestik 76,77% termasuk kategori **Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 150.000 Orang dengan realisasi 115.155 Orang .

Capaian sasaran ini adalah 53,88% termasuk kategori **Kurang Berhasil**. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara,

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu meningkatkan daya tarik dan promosi wisata baik berupa destinasi maupun event pariwisata. Secara rinci perbandingan target dan realisasi yang mendukung pencapaian Sasaran Kesembilan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kesembilan

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
9.	Terwujudnya pembangunan dan peningkatan prasarana obyek wisata	1.Kunjungan Wisatawan - Mancanegara - Domestik	Orang Orang	100 150.000	31 115.155	31 76,77
Rata-rata Capaian Sasaran Kesembilan						53,88

10 Sasaran Terwujudnya penyediaan sarana produksi pertanian dengan indikator :

- a. Persentase Kontribusi Pertanian/perkebunan terhadap PDRB tercapai 210,72% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 22,75% dengan realisasi 47,94%.

Capaian sasaran ini adalah 210,72% termasuk kategori **Sangat Berhasil**. Secara rinci perbandingan target dan realisasi yang mendukung pencapaian Sasaran Kesepuluh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kesepuluh

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
10.	Terwujudnya	Kontribusi	%	22,75	47,94	210,72

penyediaan sarana produksi pertanian	Pertanian/Perikanan terhadap PDRB					
Rata-rata Capaian Sasaran Kesepuluh						210,72

11. Sasaran Terwujudnya penyediaan sarana produksi perikanan dengan indikator :

- a. Produksi Perikanan tercapai 164% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 24.207 Ton dengan realisasi 39.703 Ton.

Capaian sasaran ini adalah 164% termasuk kategori **Sangat Berhasil**. Secara rinci perbandingan target dan realisasi yang mendukung pencapaian Sasaran Kesebelas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kesebelas

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
11.	Terwujudnya penyediaan sarana produksi perikanan	1. Jumlah Produksi perikanan	Ton	24.207	39.703	164
Rata-rata Capaian Sasaran Kesebelas						164

12. Sasaran Terwujudnya penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin dengan indikator :

- a. Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni tercapai 71,68% termasuk kategori **Cukup Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 17,30% dengan realisasi 12,4%.

Capaian sasaran ini adalah 71,68% termasuk kategori **Cukup Berhasil**. Secara rinci perbandingan target dan realisasi yang mendukung pencapaian Sasaran Kedua belas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Kedua belas

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
12.	Terwujudnya penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin	1. Rumah layak huni	%	19,78	16,37	82,75
Rata-rata Capaian Sasaran Kedua belas						82,75

13. Sasaran Terwujudnya Penataan Kawasan Pemukiman Kumuh dengan indikator :

- a. Persentase Pemukiman yang tertata tercapai 97,21% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 3236 Ha dengan realisasi 3329 Ha.
- b. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh tercapai 2,79% termasuk kategori **Kurang Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 93 Ha dengan realisasi 3329 Ha.

Capaian sasaran ini adalah 50% termasuk kategori **Kurang Berhasil**. Secara rinci perbandingan target dan realisasi yang mendukung pencapaian Sasaran Ketiga belas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Ketiga belas

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
13.	Terwujudnya Penataan kawasan	1. Persentase Penataan kawasan	Ha	3236	3329	97,21

pemukiman dan lingkungan	pemukiman lingkungan 2. Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	Ha	93	3329	2,79
Rata-rata Capaian Sasaran Ketiga Belas					50

14. Sasaran Terwujudnya Pemberian Tunjangan Hari Tua Bagi Warga Miskin dengan indikator :

- a. Penerima Tunjangan hari tua bagi warga miskin, dengan capaian 50,3% termasuk kategori **Cukup Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 9350 orang dengan realisasi 4320 Jiwa.

Capaian sasaran ini adalah 50,3% termasuk kategori **Cukup Berhasil**. Secara rinci perbandingan target dan realisasi yang mendukung pencapaian Sasaran Keempat belas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Keempat belas

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
14.	Terwujudnya pemberian tunjangan hari tua bagi warga miskin	1. Jumlah Penerima tunjangan hari tua bagi warga miskin	Orang	9.350	4.320	50,3
Rata-rata Capaian Sasaran Keempat Belas						50,3

3.4 Pengelolaan Belanja Daerah

3.3.1.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja

bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun 2022. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap OPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standard pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.1.2 Target dan Realisasi Belanja

Pada APBD Perubahan Tahun 2022 alokasi belanja daerah ditarget mencapai Rp. 899.274.050.418,00 dengan realisasi sebesar Rp. 792.847.069.456,00 atau 88,46%. Belanja daerah tersebut diperuntukkan untuk Belanja Operasi Rp. 590.085.801.673,00 dengan realisasi Rp. 515.217.438.464,00, Belanja Modal Rp. 152.349.854.351,00 dengan Realisasi Rp.125.402.521.121,00 Belanja Tidak Terduga Rp. 1.769.884.994,00 dengan Realisasi Rp.721.724.500,00, Belanja Transfer Rp.161.868.607.400,00 dengan Realisasi Rp.161.843.607.400,00 dan Belanja Transfer Rp.155.068.509.400,00 dengan Realisasi Rp.154.505.385.371,00 Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah dapat direalisasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Belanja	Target	Realisasi
1	2	3	4

1	BELANJA	899.274.050.418,00	795.847.069.456,00
	BELANJA OPERASI	590.085.801.673,00	515.217.438.464,00
	Belanja Pegawai	343.408.925.159,00	319.401.408.387,00
	Belanja Barang dan Jasa	220.017.351.376,00	175.494.805.863,00
	Belanja Hiba	16.869.744.234,00	10.843.624.410,00
	Belanja Bantuan Sosial	9.789.780.904,00	9.477.599.804,00
	BELANJA MODAL	152.349.854.351,00	125.402.521.121,00
	Belanja Modal Tanah	10.818.550.000,00	4.426.560.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.920.881.394,00	20.629.503.747,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.817.397.854,00	40.467.685.416,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigrasi	69.609.239.178,00	59.617.725.958,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	183.785.925,00	81.046.000,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.769.884.994,00	721.724.500,00
	Belanja Tidak Terduga	1.769.884.994,00	721.724.500,00
	BELANJA TRANSFER	155.068.509.400,00	154.505.385.371,00
	Belanja Bagi Hasil	2.822.000.000,00	2.258.875.971,00
	Belanja Bantuan Keuangan	152.246.509.400,00	152.246.509.400,00

*)Sumber : BPKAD Kab. Bangkep, Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

3.3.2 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 terdapat permasalahan umum yang dihadapi

yaitu :

- a. Kurangnya penyerapan belanja OPD yang disebabkan oleh tidak maksimalnya realisasi fisik dan keuangan.
- b. Belanja OPD telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang rendah di semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran berjalan.
- c. Kurang fokusnya anggaran pemerintah daerah pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi daerah sehingga berdampak pada kurang optimalnya pencapaian beberapa target indikator pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD.

Untuk menghadapi situasi ini, diperlukan penanganan atau solusi sebagai upaya pemecahan permasalahan yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Mengarahkan OPD untuk memaksimalkan proses pelaksanaan kegiatan, dengan membuat manajemen pelaksanaan kegiatan yang optimal, serta memaksimalkan fungsi pengawasan internal melalui Inspektorat daerah.
- b. Mengusahakan terjadinya penyerapan anggaran APBD dengan sebaran yang lebih merata, baik di semester pertama maupun di semester kedua, dengan kata lain diharapkan realisasi belanja tidak mengalami penumpukan pada akhir tahun.
- c. Meningkatkan koordinasi perencanaan baik secara internal eksekutif maupun antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

3.4 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

3.4.1 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah terakhir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah semua Transaksi Keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :

- a. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- b. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; dan
- c. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dititik beratkan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD dan pelampauan penerimaan dana perimbangan serta efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan tahun lalu.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2022 diarahkan penggunaannya pada penyertaan modal (investasi) daerah ke Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan daerah Air Minum (PDAM), dan Perusahaan Daerah PT. Trikora.

3.4.2 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2022, Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 91.010.156.874,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 91.010.156.874,00 atau 100%. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 3.360.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.360.000.000,00 atau 100%. Rincian selengkapnya untuk target dan realisasi pembiayaan daerah dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	91.010.156.874,00	91.010.156.874,00	100%

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	91.010.156.874,00	91.010.156.874,00	100 %
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100%

TABEL 3.19
Target dan Realisasi Belanja Baerah

TAHUN	TARGET	REALISASI		PENINGKATAN/PENURUNAN REALISASI	
		(Rp)	%	(Rp)	%
2014	554.724.155.251,36	450.428.569.055,00	81,20%	- 140.558.220.722,00	-23,78%
2015	731.231.166.932,10	603.423.163.738,16	82,52%	152.994.594.683,16	33,97%
2016	787.515.230.261,61	659.866.266.010,00	83,79%	56.443.102.271,84	9,35%
2017	887.068.020.267,30	887.068.020.267,30	100,00%	227.201.754.257,30	34,30%
2018	845.452.182.400,00	818.037.124.018,54	96,76%	- 69.030.896.248,76	-30,38%
2019	937.804.752.365,00	909.478.486.403,00	96,98%	91.441.344.384.46	17,66%
2020	822.803.010.648,00	680.956.858.670,27	82,76%	-228.521.627.732,73	-25,13
2021	859.789.002.102,98	774.774.900.295,00	90,11%	93.818.041.624,73	13,78
2022	811.623.893.544,00	787.672.259.784,04	97,36%	12.897.359.489,00	1,63%

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (*Realisasi Sementara di audit BPK)*

Gambaran umum terhadap Ringkasan Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022, sebelum dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.20
Ringkasan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
1	PENDAPATAN	811.623.893.544,00	787.672.259.784,04
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	32.525.500.000,00	32.832.038.784,04
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.611.000.000,00	6.291.387.388,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.387.000.000,00	18.571.686.406,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.517.500.000,00	2.924.652.411,84
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.010.000.000,00	5.044.312.578,20
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	773.439.062.560,00	754.840.221.000,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	745.419.991.808,00	726.494.012.219,00
4.2.2	Dana Perimbangan	636.343.004.808,00	617.417.025.219,00
4.2.3	Dana Desa	104.492.851.000,00	104.492.851.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.659.330.984,00	0,00
4.3.1	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	5.659.330.984,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	899.274.050.418,00	795.847.069.456,00
5.1	BELANJA OPERASI	590.085.801.673,00	515.217.438.464,00
5.1.1	Belanja Pegawai	343.408.925.159,00	319.401.408.387,00
5.1.4	Belanja Barang dan Jasa	220.017.351.376,00	175.494.805.863,00
5.1.5	Belanja Hiba	16.869.744.234,00	10.843.624.410,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.789.780.904,00	9.477.599.804,00
5.2	BELANJA MODAL	152.349.854.351,00	125.402.521.121,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	10.818.550.000,00	4.426.560.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.920.881.394,00	20.629.503.747,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.817.397.854,00	40.647.685.416,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.609.239.178,00	59.617.725.958,00
5.2.5	Belanja Modal aset Tetap Lainnya	183.785.925,00	81.046.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.769.884.994,00	721.724.500,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.769.884.994,00	721.724.500,00
5.4	BELANJA TRANSFER	155.068.509.400,00	154.505.385.371,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.822.000.000,00	2.258.875.971,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	152.246.509.400,00	152.246.509.400,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(87.650.156.874,00)	(8.174.809.671,96)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	91.010.156.874,00	91.010.156.874,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	91.010.156.874,00	91.010.156.874,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	87.650.156.874,00	87.650.156.874,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	79.475.347.202

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2022 ini disusun dengan sungguh-sungguh agar dapat menjadi cerminan kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 2022, sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk langkah evaluasi dan perbaikan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang. LKjIP ini menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assesment*) atas realisasi pelaksanaan rencana kinerja tahun 2022 melalui pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung indikator setingkat *outcome*. Simpulan tingkat capaian indikator kinerja dari 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.

Adapun beberapa indikator kinerja yang capaiannya di bawah 50% pada tahun-tahun berikutnya akan di upayakan perbaikan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kami menyadari masih adanya beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu tanggapan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.

Demikian LKjIP ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan ekonomis.